

Studi Reklamasi Teluk Jakarta Di Pulau C Dan D Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Dan Nilai-Nilai Pancasila

Rasminto*¹ dan Syurya M. Nur²

¹Pendidikan Geografi Universitas Islam 45, Bekasi, Indonesia

²Pendidikan Pancasila Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

*Email: rasminto@gmail.com

Received: 21 01 2018 / Accepted: 19 03 2018 / Published online: 25 07 2018

ABSTRAK

Jakarta merupakan Ibu Kota yang penuh dengan problematika, baik itu problematika sosial maupun ekonomi. Salah satunya yaitu permasalahan pembangunan proyek reklamasi teluk Jakarta yang menjadi perhatian publik nasional dengan problematika pro dan kontranya. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pembangunan reklamasi teluk Jakarta terkait pembangunan berkelanjutan dan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni mendeskripsikan fenomena kependudukan dan lingkungan di proyek reklamasi teluk Jakarta dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan dan nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa reklamasi sebuah keniscayaan bagi kota Jakarta yang terus berkembang laju pertumbuhan penduduknya, dan memiliki dampak manfaat apabila dikelola dengan baik serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemanfaatan reklamasi juga dapat menjadikan kawasan pesisir yang rusak dijadikan bermanfaat untuk kawasan pemukiman, niaga serta objek wisata. Pengembangan permukiman dari pulau reklamasi dalam pemenuhan tempat hunian warga harus dapat menciptakan iklim kehidupan yang sehat secara lingkungan, ekonomi, sosio-budaya, maupun politik berdasarkan azas dan nilai Pancasila yang dapat menjamin berlanjutnya peningkatan kualitas kehidupan bagi warga Jakarta.

Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Nilai-Nilai Pancasila, dan Reklamasi Teluk Jakarta.

ABSTRACT

Jakarta is Capital City which has been problematic like social or economic problematic. One of problematic is developing Jakarta Bay reclamation projec which it is able to attrract attention public. Based on that, the reseach aim to analysis Jakarta Bay reclamation development base on sustainable development and the value of Pancasila. Descriptive analysis method is applied, it describes population and environment phenomenon due to Jakarta bay reclamation with sustainable development and Pancasila's values approach. The result of research showing that the reclamation is a necessity of a big city like Jakarta which its population continue to grow every year and this thing become alternate development of people's needs of land fulfilment. It also give the benefit for local communities having good management and legal. The reclamation utilization is able to change of damage coastel area for settelment, trade,

and tourisem. The develop settelment areas is using reclamation island that should create healthy enviroment, economic, social, and politic based on the value of Pancasila.

Keywords: *Sustainable Development, Values of Pancasila, and Reclamation of Jakarta Bay.*

PENDAHULUAN

Jakarta Ibu Kota yang penuh dengan problematika, baik itu problematika sosial maupun ekonomi. Problematika yang sangat kental dan menjadi persoalan bersama yaitu problematika sosial dan lingkungan, pembangunan Ibu Kota DKI Jakarta menjadi sorotan dan pembahasan diberbagai kalangan.

Pembangunan proyek reklamasi teluk Jakarta yang menjadi perhatian publik nasional dengan problematika pro dan kontranya. Hampir setiap hari berita reklamasi teluk Jakarta terbit baik di media cetak lokal dan nasional maupun media online yang siap menjadi santapan hangat bagi masyarakat dan pengamat publik.

Ribuan bahkan jutaan pasang mata tersentak, tatkala kebijakan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan ijin untuk reklamasi melalui penerbitan keputusan Gubernur pada 23 Desember 2014, 22 Oktober 2015 dan 17 November 2015 untuk ijin reklamasi pambangunan pulau G, F, I dan K. Ketika itu pula, terjadi kontroversi dengan adanya penolakan oleh berbagai kalangan dari masyarakat nelayan, aktivis lingkungan hidup hingga para praktisi dan akademisi kampus. Penolakan tersebut muncul dengan berbagai macam alasan, dari masalah kontroversi hukum, penggusuran perkampungan nelayan, makin terdesaknya area tangkapan bagi nelayan, reklamasi hanya menjadi komoditas golongan kaya, tidak terpenuhinya analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga rusaknya ekosistem biota teluk Jakarta.

Perlu diketahui bahwa pada tahun 1995, Presiden Soeharto ketika itu mengeluarkan Keppres No. 52 mengenai Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Keppres tersebut mengatur bahwa gubernur DKI Jakarta adalah pihak berwenang untuk reklamasi. Pada Lampiran Keppres tersebut menunjukkan gambar di mana reklamasi tidak berupa pulau-pulau terpisah dari garis pantai utara melainkan perluasan Pantura. Namun, karena krisis moneter menimpa Indonesia ketika itu di tahun 1997, maka proses pembangunan ditunda. Selanjutnya pada tahun 1999, DPRD bersama Pemerintah Daerah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Sutiyoso dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang 2010 yang berisi reklamasi masuk ke rencana tata ruang dan berubah dari rencana 1995. Hal tersebut dengan tujuan dari reklamasi tersebut adalah untuk perdagangan dan jasa internasional, perumahan dan pelabuhan wisata. Peraturan Daerah RTRW mengatakan reklamasi seluas kurang lebih 2.700 hektar dan diperuntukkan bagi perumahan.

Setelah era Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta berganti kepada pemimpin Jakarta yang baru, melalui proses pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta tahun 2017. Publik Jakarta berharap kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih atas janji kampanye untuk menghentikan proyek reklamasi, dengan isu permasalahan penggusuran perkampungan yang merugikan masyarakat Jakarta khususnya masyarakat nelayan dan pesisir Jakarta. Akan tetapi, isu reklamasi ini menjadi menghangat kembali ketika moratorium

reklamasi yang dicanangkan sejak 2016 oleh Menko Kemaritiman Rizal Ramli dicabut oleh Menko Kemaritiman yang baru Luhut Binsar Panjaitan dengan terbitnya surat Menko Kemaritiman Nomor S-78001/02/Menko/Maritim/2017 tertanggal 5 Oktober 2017 dan pencabutan sanksi administrasi reklamasi pulau C dan D berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 299/menlhk/setjen/kum.9/9/2017 tertanggal 12 September 2017. Berdasarkan kondisi tersebut, penting menjadi kajian serius oleh Pemerintah Provinsi Jakarta dan berbagai kalangan dengan melihat aspek sosial-ekonomi, kependudukan dan lingkungan hidup serta aspek lainnya dalam memberikan solusi alternatif bagi pembangunan Jakarta yang manusiawi dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut J. Viedenbreght bahwa, tipe penelitian deskriptif analisis adalah suatu tipe penelitian yang berusaha melukiskan realitas sosial yang kompleks melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanjatkan konsep-konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sosial secara analitis. Sementara data yang diinventarisir melalui proses pencarian dokumen secara mendalam dalam rangka mendukung pencapaian tujuan penelitian.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di pulau C dan pulau D Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara. Adapun Waktu penelitian ini dilaksanakan pada November 2017. Pulau C dan Pulau D merupakan hasil reklamasi teluk Jakarta.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan dokumentasi yang

dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Jakarta: Tekanan Para Penduduk dan Frustrasi sebagai Faktor Pendorong Pembangunan.

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat 23 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mendefinisikan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

Selanjutnya, menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada pasal 1 ayat 53 menyatakan, bahwa reklamasi adalah adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.

Menurut ilmu teknik kelautan pengertian reklamasi adalah suatu pekerjaan memanfaatkan kawasan yang relatif tidak berguna atau kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa reklamasi adalah mengubah sesuatu lahan atau pantai untuk kepentingan umum.

DKI Jakarta merupakan Ibu Kota negara yang wilayahnya memiliki keunikan dengan kondisi hampir sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan air laut. Pada saat air pasang dan berbentuk rawa pantai dengan dibarengi tingginya aktivitas perkotaan, sehingga memiliki resiko bencana banjir. Kondisi ini tentunya perlu menjadi kajian mendalam bagi para pemangku kepentingan sebagai upaya pembangunan kota yang berkelanjutan.

Data kependudukan tahun 2016 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Jakarta mencapai 24,194 jiwa/ km²

dengan luas wilayah Jakarta hanya 652,96 km² (BPS, 2016). Kepadatan penduduk yang luar biasa memicu frustrasi warga kota. Selain itu menurut Daldjoeni (1977) ahli kependudukan, frustrasi ini juga akibat dari kepincangan dalam usaha pembangunan terhadap lingkungan fisis, pembatasan biologis, psikologis dan lingkungan sosial. Menurutnya tidak semua frustrasi merugikan, ada jenis-jenis tertentu yang justru mendorong pembangunan lebih lanjut. Ide “*blockades*” atau “palangan” menjadi dorongan dalam mengkaji lebih dalam tentang situasi yang dihadapi untuk menemukan jalan keluar yang baru.

Daldjoeni menyatakan bahwa respon penduduk yang kreatif dalam menghadapi tekanan penduduk dapat disamakan dengan lari cepat menaiki tangga eskalator yang bergerak turun. Kemampuan bertahan pada posisinya semacam ini, jika kemudian diterapkan pada landasan yang tak bergerak, baru akan menunjukkan “prestasi” atau kemajuan yang nyata. Selain itu, Daldjoeni mengungkapkan bahwa usaha-usaha pembangunan tak boleh mengabaikan berbagai postulat psikologis yang terkandung oleh berbagai frustrasi jenis “*blockades*” tadi. Jika mengetahui akar permasalahannya, maka situasi masih dapat diarahkan kepada perkembangan.

Berdasarkan kondisi tersebut menjadi kebutuhan mendasar penduduk kota dalam berinovasi untuk membangun kehidupan dan penghidupannya yang layak dan berkelanjutan. Roda kehidupan dan pembangunan akan selalu berputar sebagai proses seleksi alam yang akan menguatkan kapasitas sumberdaya manusia kota yang berdaya saing dan unggul.

Masa Depan Pembangunan Kota Jakarta.

Jakarta sebagai *the big city and the great pressure* dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari kondisi geografis, demografis, sosiologis, lingkungan hidup dan aspek politis sebagai Ibukota Negara, menjadi hal yang wajar dan perlu dalam mencari model pembangunan kota yang manusiawi bagi kehidupan warga kotanya. Warga kota berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif dalam keselarasan dengan alam pembangunan masa kini yang tidak boleh merugikan kebutuhan pembangunan, serta kebutuhan lingkungan generasi masa kini dan generasi mendatang.

Pencapaian pembangunan berkelanjutan, menurut Surna Tjahja Djajadiningrat dan Sutanto Hardjolukito (2013), bahwa perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap terpisah dari proses tersebut. Menurutnya, mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan dalam taraf kehidupan di berbagai pelosok dunia merupakan keharusan dalam mencapai pembangunan dan pemenuhan kebutuhan orang banyak. Untuk itu, paradigma pembangunan dengan penyelarasan lingkungan berkelanjutan menjadi hal penting sebagai pijakan warga membangun kotanya, sehingga tidak ada lagi kerugian yang besar akibat jejak pembangunan.

Menelisik lebih dalam wilayah Jakarta yang memiliki panjang garis pantai Utara Jakarta adalah \pm 32 km, meliputi garis pantai yang berbatasan dengan pantai utara Tangerang di bagian barat hingga perbatasan pantai utara Bekasi di bagian timur. Area daratan pantai lama termasuk kawasan Pantura Jakarta mencakup Kecamatan Pademangan, Penjaringan, Koja, Tanjung Priok dan Cilincing. Pada bagian selatan kawasan Pantura Jakarta berbatasan

dengan Kecamatan Kelapa Gading di Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat dan Kota Jakarta Timur.

Wilayah tersebut merupakan wilayah pesisir yang menjadi potensi dalam pengelolaan pembangunan kota. Menurut Ernan Rustiadi dkk (2012) bahwa wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah interaksi antara daratan dan lautan. Secara formal di dalam Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut.

Potensi wilayah pesisir utara Jakarta menjadi rujukan dalam kebijakan pembangunan kota, melalui kebijakan reklamasi kawasan Pantura Jakarta yang ditujukan untuk mewujudkan lahan hasil reklamasi seluas 2700 ha. Hal ini dilaksanakan secara terpadu dengan penataan kembali daratan pantai lama seluas 2500 ha, melalui program revitalisasi untuk meningkatkan kualitas fungsional, visual maupun lingkungannya. Biaya dari dana pembangunan fisik reklamasi, baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, argumentasi program tersebut tertuang pada Keppres Nomor 52 tahun 1995 yang memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menyelenggarakan reklamasi kawasan Pantura Jakarta, yang ditindaklanjuti oleh Perda DKI Nomor 8 tahun 1995 tentang penyelenggaraan reklamasi dan rencana tata ruang Kawasan Pantura Jakarta. Sementara itu Perda DKI Jakarta Nomor 6 tahun 1999 tentang RTRW Jakarta 2010 juga menjadi rujukan dalam panduan kebijakan terhadap penyelenggaraan reklamasi.

Seiring perjalanan proyek reklamasi banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Jika kita rujuk teori tentang masa depan pertumbuhan

wilayah dari sisi pandangan pesimistis yang dikemukakan oleh David Ricardo dalam Ernan Rustiadi dkk (2012) yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Robert Malthus mengungkapkan bahwa pada mulanya jumlah penduduk rendah dan kekayaan masih banyak sebagai akibatnya para pengusaha memperoleh keuntungan. Keuntungan tinggi mengakibatkan peningkatan investasi dan perluasan usaha, sehingga permintaan tenaga kerja naik. Hal ini dapat merangsang pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, sedangkan luas lahan tetap, maka makin lama lahan yang digunakan memiliki kualitas yang lebih rendah dengan luasan relatif yang semakin kecil. Situasi ini dapat mengakibatkan perekonomian mencapai *stationary state*. Maka, penting upaya untuk mengendalikan situasi ini.

Berdasarkan keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (2017) menyatakan bahwa kawasan pesisir Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah hingga 11-12 cm per tahun, ditambah dengan terjadinya kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Jakarta karena bila tidak segera ditangani, dalam beberapa tahun akan terjadi *back water*, di mana aliran sungai-sungai tidak bisa mengalir ke laut akibat lebih tingginya muka air laut.

Selain itu, pandangan lain yang diungkapkan Hayami dan Ruttan (1971) dalam Ernan Rustiadi dkk (2012) dengan merumuskan suatu model pengembangan wilayah yang dikenal dengan "*induced innovation model*". Pengembangan wilayah mau tidak mau memang memanfaatkan sejumlah sumberdaya alam. Sampai tahap perkembangan tertentu, bisa saja sumberdaya alam yang ada dirasakan semakin langka. Namun Hayami dan Ruttan berkeyakinan bahwa kelangkaan sumberdaya tersebut akan selalu memacu perkembangan teknologi untuk

menanggulangnya. Oleh karena itu, pandangan dari tokoh tersebut dapat menjadi rujukan dalam inovasi pembangunan masa depan kota Jakarta termasuk program reklamasi sebagai alternatif pembangunan yang dirasakan perlu bagi kota Jakarta.

Pemanfaatan Reklamasi Pulau C dan D

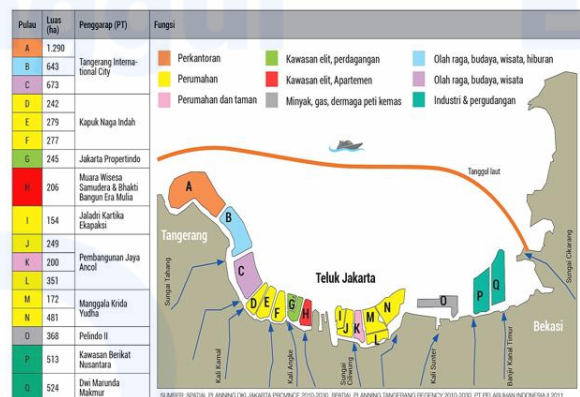
Padasarnya reklamasi sangat bermanfaat apabila dikelola dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemanfaat reklamasi menurut Kolman dapat dilakukan perluasan lahan, bagi negara dengan tingkat kepadatan pendudukan yang tinggi, reklamasi dapat digunakan untuk mengatasi kendala keterbatasan lahan pemukiman yang baru.

Selanjutnya pemanfaatan reklamasi juga dapat menjadikan kawasan berair yang rusak dijadikan bermanfaat untuk kawasan pemukiman, niaga serta objek wisata. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Daerah yang dilakukan reklamasi menjadi terlindung dari erosi karena konstruksi pengaman sudah disiapkan sekuat mungkin untuk dapat menahan gempuran ombak laut.
2. Daerah yang ketinggiannya di bawah permukaan air laut bisa terhindar dari banjir apabila dibuat tembok penahan air laut di sepanjang pantai.
3. Tata lingkungan yang bagus dengan peletakan taman sesuai perencanaan dapat berfungsi sebagai area rekreasi yang dapat memikat pengunjung. Hal ini bisa membuka mata pencaharian baru bagi warga sekitar.
4. Pesisir pantai yang sebelumnya rusak, menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Berdasarkan kebermanfaat dari reklamasi, maka reklamasi teluk Jakarta pada pulau C dan D haruslah memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar pembangunan reklamasi tersebut. Akan

tetapi, problematika kelanjutan proyek reklamasi teluk Jakarta masih terus bergulir, kepastian hukum masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Maka, pandangan ini disampaikan dengan mengedepankan studi kemanfaatan dan catatan apabila aspek kepastian hukum reklamasi teluk Jakarta sudah tidak menjadi persoalan.



Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2010-2030 dan RTRW Tangerang, PT. Pelindo II, 2011.

Dari 17 pulau reklamasi teluk Jakarta, terdapat dua buah pulau reklamasi yang sudah terbangun. Pulau tersebut adalah pulau C dan pulau D. Pulau C memiliki luas lahan 276 ha, dan pulau D memiliki luas lahan 312 ha. Komposisi rencana penggunaan lahan reklamasi pada pulau C adalah minimal 20% untuk RTH publik, minimal 10% untuk RTH Privat, minimal 10% untuk RTH Privat yang didedikasikan untuk publik, minimal 10% untuk ruang terbuka biru, minimal 10% untuk jaringan jalan, minimal 5% untuk kawasan pelayanan umum dan sosial dan maksimal 40% untuk kawasan perumahan horizontal dan vertikal, campuran, pendukung, pelabuhan, Industri dan pergudangan. Komposisi rencana penggunaan lahan reklamasi pada pulau D adalah minimal 20% untuk RTH publik, minimal 10% untuk RTH Privat, minimal 10% untuk RTH Privat yang didedikasikan untuk

publik, minimal 5% untuk ruang terbuka biru, minimal 10% untuk jaringan jalan, minimal 5% untuk kawasan pelayanan umum dan sosial dan maksimal 45% untuk kawasan perumahan horizontal dan vertical, campuran, pendukung, pelabuhan, Industri dan pergudangan.

Berdasarkan rencana komposisi tersebut, rasanya perlu diarahkan pemanfaatannya untuk kepentingan warga Jakarta. Kepemilikan rumah bagi warga Jakarta menjadi barang langka, karena nilai tanah dan bangunannya yang terlampau mahal. Oleh karena itu, pulau C dan D yang sudah terbangun tersebut menjadi alternatif penyediaan lahan permukiman bagi warga Jakarta, terlebih dalam memenuhi janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih dimana sangat sulit untuk penyediaan lahan tersebut.

Selanjutnya hal yang paling penting dalam pengembangan permukiman, disamping pengadaan rumah untuk tempat tinggal adalah penciptaan iklim kehidupan yang sehat secara lingkungan, ekonomi, sosio-budaya, maupun politik yang dapat menjamin berlanjutan peningkatan kualitas kehidupan bagi warga Jakarta. Jangan ada lagi penggusuran atas nama ketertiban umum yang pada akhirnya warga yang mengalami kerugian secara ekonomi dan sosial. Alternatif penyelesaian pembangunan permukiman bagi warga Jakarta dapat terpenuhi, dengan pemanfaatan pulau reklamasi tersebut guna kemasalahatan masyarakat.

Pemanfaatan Reklamasi dalam Pembangunan Nilai-nilai Pancasila.

Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada hakikatnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus

mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan nasional adalah untuk manusia Indonesia, di mana manusia secara kodratnya memiliki kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, pembangunan nasional hendaklah mewujudkan tujuan tersebut.

Pembangunan Ibu Kota DKI Jakarta dalam hal ini pembangunan proyek reklamasi teluk Jakarta, merupakan pembagunan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kemanfaatan masyarakat. Pembangunan proyek reklamasi sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila diartikan sebagai upaya bersama untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sarana-saranan-sarana kehidupan sedemikian rupa sehingga tercipta tingkat dan mutu kehidupan bangsa dan negara secara seimbang, baik dalam sikap dan perilaku warga bangsa maupun dalam tata kemasyarakatan.

Proses pembangunan tersebut terwujud dalam pelaksanaan emansipasi bangsa, modernisasi kehidupan bangsa dan negara serta dinamisasi kehidupan masyarakat setempat. Selain itu juga terwujud dengan melaksanakan demokratisasi kehidupan bangsa dan negara, integrasi nasional dan humanisasi bangsa dan negara.

Menurut Syarial (2016:86), bahwa Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus memperhatikan konsep berikut ini :

1. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa.
2. Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional.
3. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional, proses pembangunan nasional tidak terlepas dari kontrol nilai-nilai Pancasila.
4. Pancasila merupakan etos pembangunan nasional, untuk

mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan diciptakan misi pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Pancasila sebagai moral pembanguna, sebutan ini mengandung maksud agar nilai-nilai luhur Pancasila (norma-norma Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945) dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam evaluasinya.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka pembangunan reklamasi teluk Jakarta, lebih khusus pada pulau C dan D apabila dianalisis berdasarkan nilai-nilai Pancasila harus diletakkan sebagai kerangka berpikir yang objektif rasional dalam membangun reklamasi tersebut. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat dari pembangunan reklamasi harus semakin menempatkan nilai-nilai Pancasila yang dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, kemana arah pembangunan melalui tahap-tahapnya tidak dapat dilepaskan dari usaha mengimplementasikan nilai-nilai dan norma Pancasila demi kemaslahatan masyarakat, sehingga pembangunan adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila. Konsisten antara teori dan kenyataan serta ucapan dengan tindakan, merupakan paradigma baru dalam menjadikan Pancasila sebagai etika pembangunan nasional.

KESIMPULAN.

Kesimpulan penelitian ini yakni; 1) reklamasi sebuah keniscayaan bagi kota Jakarta yang terus berkembang laju pertumbuhan penduduknya dan memiliki dampak manfaat apabila dikelola dengan baik serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; 2) pemanfaatan reklamasi

dapat menjadikan kawasan pesisir yang rusak dijadikan bermanfaat untuk kawasan pemukiman, niaga serta objek wisata; 3) pengembangan permukiman dari pulau reklamasi dalam pemenuhan tempat hunian warga harus dapat menciptakan iklim kehidupan yang sehat secara lingkungan, ekonomi, sosio-budaya, maupun politik berdasarkan azas dan nilai Pancasila yang dapat menjamin berlanjutnya peningkatan kualitas kehidupan bagi warga Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki Hadimuljono dalam mencermati penurunan muka tanah kawasan Jakarta dalam situs <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3453249/permukaan-tanah-turun-12-cmtahun-tanggul-pantai-jakarta-jadi-prioritas>. Diakses pada 3 Maret 2018.
- BPS Jakarta, 2017. Data Kepadatan Penduduk Jakarta tahun 2016.
- Daldjoeni, 1977. Penduduk, Lingkungan dan Masa Depan. Bandung: Penerbit Alumni.
- Djajadiningrat, Surna Thahja dan Sutanto Hardjolukito, 2013. Demi Bumi, Demi Kita: Dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau. Jakarta: Media Indonesia Publishing.
- J. Viedenbreght, 1983. Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Pelajar.
- Kolman, R., New Land By The Sea: Economically And Socially, Land Reclamation Pays (1st ed.).

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Kosdakarya.

Rustiadi, Ernan dkk, 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Syahrial & Aliaras, 2016. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: PAMU Esa Unggul.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

W. Lawrence, Neumann. 2005. *Sosial Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. United States of America: Pearson Education Inc.

<http://www.ilmusipil.com/analisa-dampak-reklamasi-pada-daerah-pesisir-pantai/diakase-pada-tanggal-3-Maret-2018>.